

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tempat tinggal mempunyai peranan penting secara sosial dan budaya, tidak hanya sebagai kawasan perlindungan alam dari berbagai ancaman, namun juga menjadi landasan pendidikan rumah dalam pengembangan dan peningkatan kualitas generasi muda masa depan. Perumahan dan permukiman berarti hak asasi setiap warga negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 perumahan dan fasilitas perumahan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menempati, menikmati dan atau mempunyai perumahan yang bermartabat dalam lingkungan hidup yang sehat, aman, harmonis dan tertib¹.

Perumahan tidak hanya merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia saja, namun mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melahirkan karakter dan kepribadian suatu bangsa, oleh karena itu perlu didukung dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan taraf hidup dan penghidupan masyarakat. Perumahan tidak hanya dipandang sebagai wahana pemuasan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai proses pemukiman manusia, yang meliputi penciptaan ruang

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, LN.2011/No. 7, TLN No. 5188, LL SETNEG: 89 HLM* (Jakarta, 2011)

hidup dimana seseorang dapat menjalin kontak sosial dan mengekspresikan jati dirinya.

Saat ini ketersediaan perumahan layak huni menjadi informasi yang sangat penting karena meskipun wilayah Indonesia luas, namun pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia masih belum merata dan masyarakat miskin masih mengharapkan dukungan dan perhatian pemerintah untuk memiliki rumah yang layak. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu karena mereka adalah masyarakat Indonesia yang juga berhak menerima bantuan sosial.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014 mencanangkan acara yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpendapatan rendah. pendapatan penduduk. Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Insentif Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah².

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 07 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan Pembangunan Perumahan dan penyediaan perumahan khusus Bantuan swadaya bagi pelaku perumahan yang selanjutnya

² Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

disingkat BSPS merupakan dukungan pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kewirausahaan kualitas perumahan dan pembangunan perumahan baru serta prasarana, sarana dan pelayanan umum.

Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator atau pendukung dalam menyediakan sumber daya dan kemampuan yang diinginkan. Kenyataannya di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak. Pemerintah Indonesia masih menghadapi masalah kualitas perumahan yang tidak memadai. Pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan pemerintah kota secara umum belum memenuhi kriteria standar perumahan layak huni sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perumahan Swadaya. Standar perumahan layak huni meliputi ketahanan konstruksi, kecukupan ruang dan akses terhadap sanitasi dan air minum yang memadai (SE nomor 14/SE/Dr/2022). Kurangnya perumahan yang layak huni ditimbulkan oleh ketidakmampuan rakyat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari segi ekonomi³.

Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perumahan yang layak mengakibatkan lingkungan hidup menjadi tidak sehat, dimana tempat tinggal yang tidak layak huni pada umumnya kumuh. Kondisi lingkungan yang buruk mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan kualitas

³ Kementerian PUPR Direktorat Rumah Swadaya, *Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya* (Jakarta, 2023)

hidup seseorang, menjadikan suatu rumah layak huni bukanlah suatu hal yang praktis⁴. Untuk mengatasi konflik tersebut, salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun masyarakat juga harus bisa mandiri. Perumahan swadaya menggambarkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan perumahan layak huni tanpa hanya mengandalkan dukungan pemerintah.

Kontribusi pemerintah terhadap masyarakat berpendapatan rendah untuk Meningkatkan dan meningkatkan swasembada melalui peningkatan kualitas rumah dan pembangunan tempat tinggal baru serta utilitas dan infrastruktur umum. Penyediaan perumahan swadaya ini telah banyak menampung masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun permasalahan yang ada bermula dari pembangunan rumah swadaya yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas, sehingga kurangnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai perumahan layak huni (RLH). Hal ini mengakibatkan dalam jangka panjang kondisi tempat tinggal yang dibangun tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menciptakan rumah layak huni secara mandiri dengan menggunakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

⁴ Jempper, J., No, V., Jannah, H. M., Ekonomi, F., & Tadulako, U. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol.

Dengan membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, program bedah rumah berdampak baik pada masyarakat yang membutuhkan dan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini melibatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan, sehingga warga dapat membantu memilih kebutuhan dan prioritas pengumpulan data. Secara holistik, program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan upaya efektif untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama dengan membantu masyarakat memperbaiki rumahnya dan memenuhi kebutuhan dasar manusia akan perumahan yang layak.

Salah satu wilayah yang turut melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Provinsi Jambi. Pelaksanaan program ini di tingkat kota dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam bidang perumahan. Program BSPS terus dilanjutkan sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 285 unit rumah tangga di Kota Jambi menjadi penerima manfaat program ini. Penerima bantuan tersebut tersebar di 7 dari total 11 kecamatan yang ada di wilayah Kota Jambi, yang menunjukkan adanya penyebaran bantuan yang cukup merata namun tetap menunjukkan konsentrasi di wilayah tertentu. Adapun rincian jumlah penerima bantuan berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jambi Timur	115 Unit
2	Paal Merah	53 Unit
3	Telanaipura	84 Unit
4	Jelutung	4 Unit
5	Kota Baru	16 Unit
6	Pasar	8 Unit
7	Danau Sipin	41 Unit
8	Jambi Selatan	-
9	Pelayangan	-
10	Danau Teluk	-
11	Alam Barajo	-

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatra IV 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan Jambi Timur menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yaitu sebanyak 115 rumah. Sedangkan, Kecamatan Jelutung merupakan wilayah dengan jumlah penerima terendah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan secara berkelanjutan di Kota Jambi. Program ini menasar masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperbaiki kondisi rumah mereka secara swadaya dengan bantuan stimulan dari pemerintah. Untuk melihat perkembangan pelaksanaan program ini dari waktu ke waktu, berikut data jumlah penerima

bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022 :

Tabel 1.2

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi 2018-2022

No	Tahun	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1	2018	312
2	2019	300
3	2020	555
4	2021	263
5	2022	36

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan perumahan Sumatra IV 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2020 mencatatkan jumlah penerima bantuan tertinggi, yakni sebanyak 555 unit rumah. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah penerima mengalami penurunan drastis menjadi hanya 36 rumah, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, atau fokus program yang lebih terseleksi. Di kota jambi sendiri pada tahun 2021 terdapat 6353 rumah tidak layak huni, apakah dengan kuota tersebut akan berdampak signifikan terhadap perbaikan rumah layak huni di kota jambi. hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut pada penelitian ini.

Salah satu tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada penerima untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan sebanyak Rp20.000.000,- yg terbagi atas Rp17.500.000,- yang digunakan buat pembelian bahan-bahan

konstruksi. Saldo lainnya ialah Rp 2.500.000 wajib membayar gaji para pekerja⁵. Program BSPS dikembangkan dengan tujuan agar warga berpenghasilan rendah dapat secara mandiri meningkatkan kualitas rumah mereka sehingga mereka dapat memiliki rumah permanen yang layak huni serta menjamin kehidupannya pada masa depan⁶.

Permasalahan dari program ini adalah kurang efektifnya dalam pemilihan gudang material yang akan digunakan untuk renovasi rumah, karena dikelola langsung oleh pengelola program bantuan perumahan swadaya, warga yang dibantu hanya menyampaikan laporan material yang dipesan oleh pengelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Nantinya mereka akan membeli bahan-bahan yang diperlukan. Masyarakat penerima bantuan ini seringkali mengeluh karena adanya keterlambatan kedatangan material sehingga pembangunan rumah memerlukan proses renovasi yang relatif lama. Selain itu permasalahan yang ada pada program bantuan ini adalah masih banyak warga yang belum mampu memenuhi persyaratan program ini, padahal jika dilihat dari kondisi rumah yang mereka tinggali sangat layak untuk menerima bantuan tersebut. Sehingga program ini masih mempunyai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan selanjutnya adalah lokasi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya jauh dan sulit dijangkau kendaraan material. Hal ini menjadi tantangan lain bagi pengelola program ini agar penerima bantuan di daerah

⁵ Rizkie Fauzian, '285 KK Di Jambi Dapat Bantuan Rp20 Juta Untuk Perbaiki Rumah', *Medcom.Id*, 2023, pp. 1–1.

⁶ dadag, 'Sebanyak 93.139 Unit Rumah Swadaya Telah Disalurkan Pada Semester I 2023',

terpencil juga bisa merasakan dampak dari program ini. Kemudian ditambah juga dengan rendahnya kemandirian masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya kemampuan berswadaya, kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, aman dan nyaman serta lingkungan yang layak oleh masyarakat, dan juga pola pikir manusia yang menurut mereka taraf hidupnya berbeda-beda. Jadi bukan hanya persoalan pelaksanaannya saja, tapi juga masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan referensi penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Indah Khairunnisa dan Rahmi Biologi dengan judul Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berlokasi di Desa Mangkusip Kecamatan Tabalong Kabupaten Tanta. Penelitian ini menggunakan metode naratif-kualitatif. Konflik dalam penelitian ini adalah kurangnya perumahan layak huni di Desa Mangkusip Kecamatan Tabalong Kabupaten Tanta. Hasil dari penelitian ini dikategorikan sangat berhasil. Terlihat bahwa indikator Sehat dikategorikan berhasil, indikator Aman dikategorikan sangat berhasil, sedangkan indikator Kenyamanan dikategorikan sangat berhasil. Metode teoritis Michael Scriven—model formatif-sumatif—digunakan untuk mencapai tujuan ini⁷.

Penelitian Ratih Widiyanti, Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten

⁷Indah Khairunnisa and Rahmi Hayati, 'Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong', *Jurnal STIA Tabalong*, 4.2 (2021), 1424–35.

Tulungagung hampir sama. Penelitian menemukan bahwa membangun rumah yang layak huni adalah hal yang mustahil dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kondisi kehidupan yang sangat buruk. sehingga kondisi perekonomian sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, membangun perumahan layak huni membutuhkan biaya yang besar sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mencapainya. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang berasal dari kelompok berpendapatan rendah yang masih belum mempunyai tempat tinggal yang layak huni, aman, sehat dan nyaman.

Penelitian ini akan mencakup enam elemen: efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum diberikan bantuan. Meski bantuan bahan yang diberikan cukup besar, namun biaya yang tukang sendiri masih belum tercukupi karena masyarakat penerima bantuan harus menggunakan uang sendiri untuk biaya tersebut. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dikatakan masih belum efektif karena jumlah dana yang dimiliki kelompok sasaran terbatas. Selain itu, kelompok sasaran penerima bantuan juga berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya sehingga besaran bantuannya tidak sama satu sama lain⁸.

⁸Ratih Widayanti, Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung (Tulungagung, 2019).

Penelitian lebih lanjut oleh Pramudita Febrihana, Kak Hadiyati, Wiwin Priana berjudul Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong dan Meningkatkan Inisiatif Swasembada Masyarakat di Kecamatan Tambaksari untuk Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya kriteria standar rumah layak huni. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui program ini, penerima bantuan berusaha menunjukkan kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kemandiriannya setiap hari selama penerapan BSPS. Mereka yang menerima bantuan biasanya memberikan uang sebagai tanda kemandirian karena mereka dianggap mempunyai keterampilan pertukangan yang lebih kuat dari yang dibutuhkan.

Namun bagi mereka yang ahli di bidang tersebut, mereka akan memilih swasembada energi dengan membangun rumah sendiri untuk menghemat biaya tenaga kerja, yang kemudian dapat dialihkan untuk membeli bahan bangunan tambahan. Sebaliknya, tingkat swasembada masyarakat akan mempengaruhi kualitas perumahan yang layak huni. Tingkat swasembada yang lebih tinggi berkaitan dengan kualitas perumahan yang disediakan⁹.

⁹Pramudita Febrihana, Sis Hadiyati, and Wiwin Priana, Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.21 (2023), 538–46.

Dari penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di atas, masih terdapat kekurangan dan banyak juga permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pada penelitian kali ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, permasalahan yang penulis bahas disini adalah kurang optimalnya kerja pengelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kurang efektifnya pemilihan toko material, dan belum maksimalnya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya karena lokasinya yang jauh. dan sulit dijangkau sehingga penulis dapat melakukan evaluasi terhadap program Pemerintah Daerah. Dimana belum dilakukan penelitian evaluasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Jambi yang berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni khususnya Kota Jambi.

Suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan tentunya memerlukan suatu penilaian untuk mengetahui sejauh mana hasil dari kebijakan tersebut telah dicapai, dampak kebijakan dalam kaitannya dengan tujuan atau indikator keberhasilan dalam konteks program kebijakan yang dievaluasi. Pengkajian yang dilakukan dapat memberikan bantuan berupa solusi terhadap konflik yang ada dan penulis dapat memberikan alternatif pedoman inisiatif pemerintah daerah terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Jambi.**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menegaskan kembali masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan dari penelitian, berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi?
2. Apa faktor Penentu Keberhasilan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat yang diperlukan, dan berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui faktor Penentu Keberhasilan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diperlukan dapat memberikan manfaat antara lain yakni:

1. Manfaat Teoritis

Yang akan terjadi adalah penelitian ini perlu digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pemerintahan, dan juga diperlukan sebagai sertifikat/acum untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk menjadikan Kota Jambi layak huni dari segi ketenangan hayati, ketersediaan infrastruktur dan kualitas hidup yang lebih baik. serta strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif pada pengurangan kemiskinan pada perumahan tidak layak huni.

1.5. Landasan Teori

Teori merupakan alat yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang nantinya ditemukan di lapangan. Beberapa teori digunakan untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Berikut teori yang peneliti gunakan :

A. Kebijakan Publik

Pemerintah menciptakan agenda kebijakan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup atau permasalahan publik yang dikenal dengan istilah kebijakan publik. Kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan, baik dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali.¹⁰

¹⁰ Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 145.

Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan penyelesaian konflik, adalah kebijakan.

Kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan kompleks, yang umumnya melibatkan proses analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Karena fokus pada implementasi dan evaluasi penulis hanya akan menjelaskan secara garis besar implementasi dan evaluasi. Berikut 5 tahapan umum dalam pengambilan kebijakan publik:

- a. Identifikasi masalah: tahap pertama pengambilan kebijakan berarti mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani
- b. Hal ini melibatkan analisis mendalam tentang sifat, akar penyebab, dan dampak masalah terhadap warga negara.
- c. Perumusan kebijakan: setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang akan mengatasi atau mengurangi masalah tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan solusi yang efektif.
- d. Pengambilan keputusan: setelah kebijakan dirumuskan, proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan pemilihan di antara berbagai pilihan kebijakan yang telah dirumuskan, dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.
- e. Implementasi: Tahap implementasi melibatkan penerapan kebijakan yang telah dipilih. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan struktur

atau forum organisasi yang diinginkan, serta penerapan program acara dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- f. Penilaian dan perbaikan: tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil.
- g. Tujuan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan data dan permasalahan mengenai konsekuensi kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. hasil penilaian digunakan untuk
- h. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, dan melakukan pembaruan atau penyesuaian yang diperlukan. karena penekanannya hanya pada implementasi dan penilaian, maka penulis hanya akan menyebutkan secara singkat implementasi dan evaluasi saja.

B. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah proses menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Keterkaitan dalam proses kebijakan publik yang meliputi tahap evaluasi ditemukan oleh James P. Lester dan Joseph Stewart, yaitu bahwa penilaian kebijakan bertujuan untuk mengamati penyebab kegagalan kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang dilaksanakan sebagai suatu fenomena mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan¹¹.

¹¹Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Center Ft Academic Publishing Service, 2012), Hlm. 165.

Kriteria evaluasi kebijakan dan beberapa standar rekomendasi kebijakan diusulkan oleh William N. Dunn:

a. Efektifitas (*effectiveness*)

Mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran program tercapai, suatu program dikatakan efektif jika hasilnya sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.¹²

b. Efisiensi (*efficiency*)

Mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang digunakan semakin besar hasil dengan sumber daya minimal maka semakin efisien program tersebut.

c. Kecukupan (*adequacy*)

Menilai apakah hasil yang dicapai program cukup besar untuk mengatasi masalah yang ada. Artinya, sejauh mana program bisa mengurangi atau menyelesaikan permasalahan secara signifikan. Kriteria kesesuaian menekankan hubungan antara pilihan kebijakan dan hasil yang diharapkan serta hasil yang diharapkan.

d. Perataan (*equity*)

Mengukur sejauh mana manfaat program didistribusikan secara adil di antara kelompok masyarakat program dikatakan adil jika tidak menimbulkan kesenjangan baru. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan

¹²Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, dkk. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rap Poverty*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 181-197.

adalah kebijakan yang memberikan hasil (seperti kinerja atau manfaat moneter) atau upaya (seperti biaya moneter) secara adil.

e. Responsivitas (*responsiveness*)

Menunjukkan seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu dalam masyarakat. Kriteria daya tanggap sangat penting karena suatu analisis yang dapat memenuhi seluruh kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan keadilan akan gagal jika analisis tersebut tidak menjawab kebutuhan kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Mengukur sejauh mana program dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata, sasaran yang tepat, dan kondisi lingkungan yang ada. Program harus tepat sasaran dan tidak salah dalam penentuan penerimaan. Nilai tujuan program dan kelayakan asumsi yang mendasari tujuan tersebut disebut kesesuaian¹³.

Evaluasi mempunyai arti suatu cara untuk menjelaskan berhasil atau tidaknya penerapan suatu program, oleh karena itu pengertian penilaian sering digunakan untuk menunjukkan tahapan-tahapan siklus pengelolaan yang meliputi:

1) Penilaian pada jangka waktu perencanaan (Ex-Ante). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk menentukan dan memprioritaskan

¹³William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), 429 – 438.

berbagai metode lain serta jalur yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan sebelumnya.

2) Evaluasi pada periode pelaksanaan (On-Going). Pada tahap implementasi, penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Evaluasi pada tahap Pasca Penerapan (Ex-Post) Pada tahap pasca penerapan, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah capaian (output/apa yang akan terjadi/dampak) dari kegiatan tersebut dapat menjawab tantangan pembangunan yang diinginkan. Setelah program selesai, evaluasi ini dilakukan untuk menilai relevansi (dampak dan masukan), efektivitas (hasil dan keluaran), kegunaan (dampak dan akibat), dan keberlanjutan (dampak dan keluaran dan produk).

Dari ketiga jenis pelaksanaan evaluasi tersebut, evaluasi yang dilakukan setelah selesainya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Ex-Post Evaluation) digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, arah penelitiannya adalah untuk mengevaluasi keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi. Efektivitas (hasil dan dampak terhadap tujuan) atau kegunaan (dampak terhadap kebutuhan) program dinilai melalui evaluasi.

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas hunian mereka. Program ini tidak hanya memberikan bantuan stimulan berupa bahan bangunan atau dana, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan maupun perbaikan rumah tinggal. Dukungan ini meliputi pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penyediaan fasilitas dan layanan umum yang mendukung kehidupan yang sehat dan layak.

Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa mekanisme swadaya masyarakat melalui penggalangan sumber daya, baik tenaga, dana tambahan, maupun solidaritas sosial merupakan komponen utama dalam mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau. Artinya, meskipun pemerintah memberikan bantuan, keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kemampuan masyarakat untuk mengelola serta melengkapi kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Oleh karena itu, aspek kemandirian memegang peranan krusial dalam pelaksanaan program ini. Kemandirian tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah, tetapi juga

menunjukkan kesiapan mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan. Jika semangat kemandirian ini tidak terbangun, maka tujuan utama dari program, yaitu menciptakan rumah layak huni yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat, akan sulit tercapai secara optimal.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022, persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut:

1. rakyat negara Indonesia yang menikah
2. bukan pemilik rumah atau tempat tinggal yang tidak layak huni
3. Belum pernah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau jenis bantuan lainnya di bidang perumahan
4. Upah minimum provinsi adalah pendapatan maksimum.

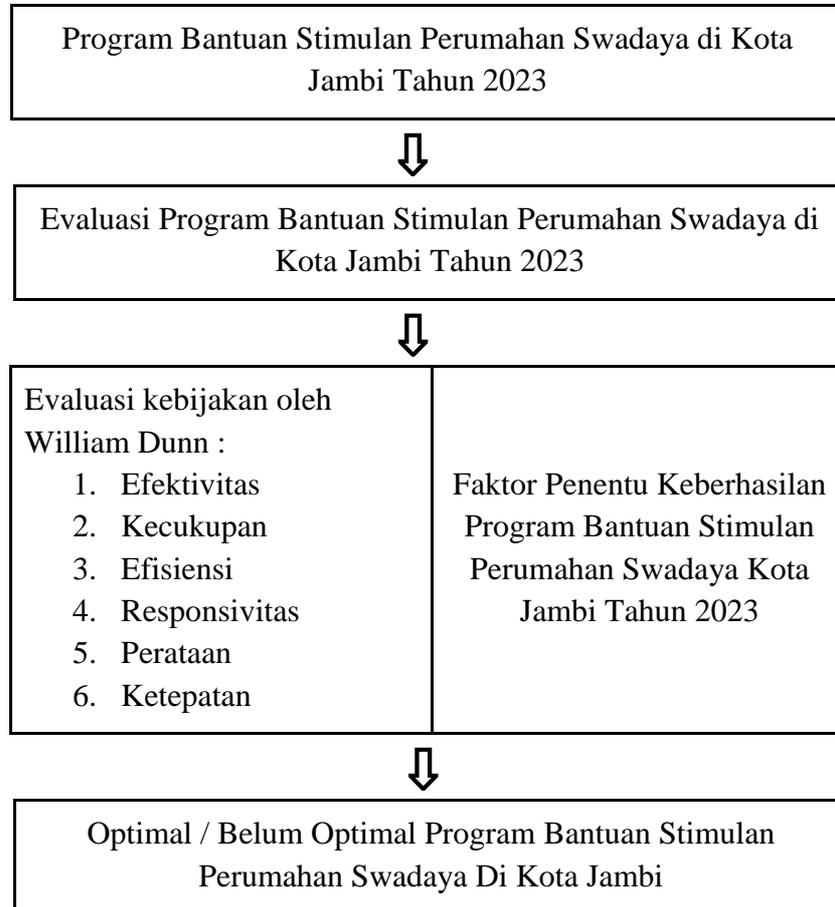
Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat keselamatan konstruksi dan mencakup luas minimum konstruksi serta menjamin kesehatan penghuninya. Jadi ada 3 kriteria rumah yang layak huni dan berkualitas: sehat, aman dan nyaman.

1. Rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan, termasuk:
 - a. Sinar matahari yang menembus rumah
 - b. Sirkulasi udara yang baik
 - c. Toilet dan MCK yang sehat dan terawat
2. Rumah yang aman untuk ditinggali:
 - a. Struktur rumah yang kuat

- b. Penggunaan bahan bangunan SNI (Standar Nasional Indonesia)
- 3. Rumah yang layak huni dan nyaman adalah rumah yang dapat memberikan kenyamanan bagi setiap orang di dalamnya:
 - a. Luas minimal untuk tempat tidur setiap orang adalah 9 meter persegi.
 - b. Luas rumah dengan empat orang adalah $4 \times 9 = 36$ meter.

1.6. Kerangka Pikir

Gambar 1.1



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, alasan penulis memilih Kota Jambi sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun, meskipun program ini telah berjalan, jumlah kuota penerima bantuan masih belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6.353 unit rumah tidak layak huni di Kota Jambi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jumlah bantuan yang tersedia dengan tingkat kebutuhan perbaikan perumahan. Sehingga menarik untuk

diteliti lebih lanjut dalam konteks efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Untuk mengetahui seberapa optimal program BSPS perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan teori evaluasi untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada. Pada teori William Dunn terdapat 6 Indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan, Perataan, Responsivitas, dan Kecukupan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, setelah mengetahui hasilnya sebagaimana seharusnya penulis dapat memberikan solusi atau alternatif, sehingga terdapat pengembangan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Jambi Tahun 2023.

1.7. Metode Penelitian

Cara melakukan penelitian disebut metode penelitian, yaitu tata cara menentukan dan merumuskan kebenaran tentang objek atau fenomena yang diteliti¹⁴. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi bagaimana Program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya dilaksanakan di Kota Jambi kemudian dilakukan evaluasi lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan dinamis dalam hal ini, diperlukan survei langsung dan wawancara lapangan dengan subjek penelitian terkait.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam “Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Jambi” adalah kualitatif deskriptif. Sehingga

¹⁴Sofyan Syafri Harahap. *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hal.56.

permasalahan dalam pelaksanaan program swadaya Bantuan Stimulasi Perumahan di Kota Jambi dapat diuraikan secara detail dan jelas. Selanjutnya diperlukan observasi mendalam dan wawancara kepada penerima penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Memperoleh data yang akan digunakan untuk menjawab perselisihan. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Kota Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu daerah yang banyak mendapat dukungan sehingga sangat mendukung dalam hal akses informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.

1.7.3. Fokus Penelitian

Penekanan penelitian berfungsi untuk memperjelas fokus kajian dengan cara mempersempit ruang lingkup penelitian agar tetap relevan dengan permasalahan inti yang hendak dianalisis. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan secara khusus untuk mengkaji pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Jambi pada tahun 2023. Fokus ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai sejauh mana program tersebut berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Asal data primer dan sekunder digunakan untuk penelitian ini:

a. Data Primer

Data utama yang diperlukan untuk penelitian disebut sebagai data primer. Data tersebut diperoleh peneliti hanya dari sumber asli atau lokasi objek penelitian; bahkan bisa dikatakan data tersebut diperoleh dari penyelidikan lapangan pada penelitian ini. Data utama ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan dan observasi langsung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari usul yang ada oleh peneliti disebut data sekunder.¹⁵ Jika dalam hal ini berasal dari buku, artikel, internet atau media yang relevan dengan menggunakan penekanan penelitian dan juga penelitian yang akan terjadi telah terangkum dalam dokumen.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dari sumber data untuk tujuan eksklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi informan. adalah memilih sumber data atau orang yang diyakini paling mengetahui apa yang dibutuhkan¹⁶.

¹⁵ Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.19

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 218-219.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Mereka adalah orang-orang yang diyakini memiliki pengetahuan jernih mengenai program swadaya Bantuan Stimulasi Perumahan di Kota Jambi. Informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Kota Jambi.
- 2) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Jambi
- 3) Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan informasi yang ada, yaitu berita konkrit yang diperoleh melalui observasi¹⁷. Observasi kualitatif adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Dalam observasi ini peneliti mencatat kegiatan-kegiatan di tempat penelitian, baik yang terstruktur maupun semi terstruktur. Peneliti mengumpulkan data lokasi dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi¹⁸.

¹⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm.157.

¹⁸ John W. Creswell. *Op. Cit.*, hlm.254

b. Wawancara

Penulis dapat melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan metode wawancara kualitatif, dimana umumnya ia menyajikan pernyataan-pernyataan yang tidak terstruktur dan terbuka yang bertujuan untuk memperoleh pandangan atau pendapat dari partisipan. Secara sederhana wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau dengan kata lain mengumpulkan data.

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Seksi Wilayah II Kota Jambi	1
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Jambi	1
3	Masyarakat Penerima BPS	7
	Total	9

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi untuk kemudian dipelajari yang dapat menunjang kebutuhan penulis. Dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, berkas, dokumen, gambar tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian penelitian¹⁹.

¹⁹ Sugiyono, Op.Cit., hlm. 240

1.7.7. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁰

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, menyeleksi hal yang krusial, memusatkan perhatian pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya jika diinginkan.

b. Paparan Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan gabungan berita atau informasi terstruktur yang memungkinkan ditariknya kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan deskripsi singkat, diagram, korelasi antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan.

²⁰ Sugiyono, Op.Cit., hlm. 247-252

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*drawing/verifying conclusions*)

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah mengkaji dan menarik kesimpulan; ini dikenal sebagai penggalian makna dari sumber data yang ditunjukkan.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan. Karena jumlah data yang besar, validitas data menjadi sangat penting. Triangulasi digunakan sebagai teknik yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran mutlak, melainkan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap temuan yang diperoleh.